

Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Minda Surelvi¹, Urmatul Uska Akbar²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: minda.surelvii@gmail.com, urmatulakbar@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

08 Agustus 2025

Disetujui:

14 Agustus 2025

Terbit daring:

17 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Surelvi, M. & Akbar, U.U. (2025). Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia.

Abstract:

This study aims to examine the effects of: (1) government expenditure, (2) tax revenue, and (3) gross domestic product on the open unemployment rate in Indonesia. The data used in this research are time series data covering the period from 1988 to 2023. This is a quantitative study employing the Error Correction Model (ECM). The findings reveal that: (1) In the long run, government expenditure, tax revenue, and gross domestic product have a negative and significant effect on the open unemployment rate in Indonesia. (2) In the short run, tax revenue and gross domestic product have a negative and significant effect on the open unemployment rate in Indonesia, while government expenditure has no significant effect on the open unemployment rate. These findings highlight the importance of fiscal reforms oriented toward productive sectors and the enhancement of economic growth quality to sustainably reduce unemployment.

Keywords: Government Expenditure, Tax Revenue, Gross Domestic Product, Error Correction Model (ECM)

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) pengeluaran pemerintah, (2) pendapatan pajak, dan (3) produk domestik bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data deret waktu dari tahun 1988-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan model ECM (Error Correction Model). Hasil observasi menunjukkan bahwa: (1) Dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan produk domestik bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. (2) Dalam jangka pendek, pendapatan pajak dan produk domestik bruto berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Temuan ini mengindikasikan pentingnya reformasi fiskal yang berorientasi pada sektor produktif serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Pajak, Produk Domestik Bruto, Error Correction Model (ECM)

Kode Klasifikasi JEL: H23, O47, P44

PENDAHULUAN

Pengangguran masih menjadi persoalan struktural yang kompleks dalam perekonomian Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada pelemahan kinerja ekonomi, tetapi juga memperburuk kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakstabilan sosial. Salah satu bentuk pengangguran yang paling nyata adalah pengangguran terbuka, yaitu kondisi ketika individu aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkannya

Di Indonesia, permasalahan pengangguran memiliki karakteristik yang kompleks, terutama karena belum selarasnya pertumbuhan ekonomi dengan penciptaan lapangan kerja. Meskipun Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan pertumbuhan positif, laju penciptaan kerja tidak selalu mengikuti arah yang sama. Ketidaksesuaian antara laju pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja menyebabkan munculnya fenomena jobless growth, yakni pertumbuhan PDB yang tidak diiringi oleh peningkatan signifikan dalam serapan tenaga kerja.



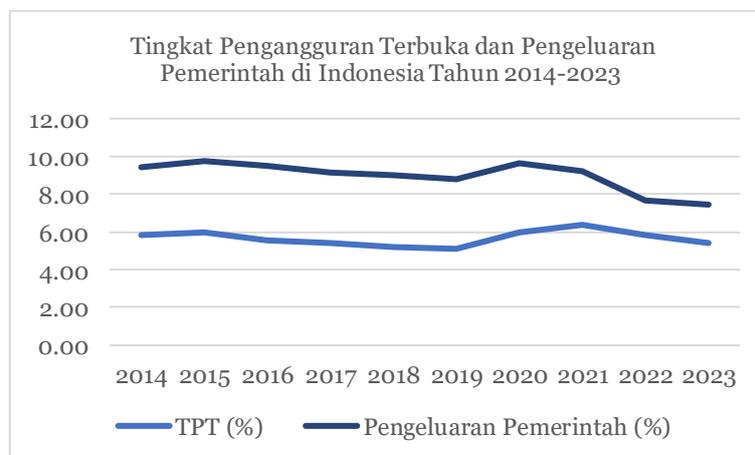
Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS) 2025

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 1988-2023

Gambar di atas memperlihatkan TPT di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 1988–2023. Pada awal periode (1988-1997), tingkat pengangguran relatif stabil di kisaran 2,5-4%. Namun, krisis moneter Asia tahun 1998 menyebabkan lonjakan signifikan, dengan TPT mencapai puncaknya sekitar 9,86% pada tahun 2004. Pasca-krisis, terjadi penurunan bertahap hingga mencapai titik terendah sekitar 5,11% pada 2019. Pandemi COVID-19 memicu peningkatan kembali menjadi 6,38% pada 2021, sebelum akhirnya menurun kembali pada 2023. Secara umum, fluktuasi TPT mencerminkan sensitivitas pasar tenaga kerja terhadap guncangan ekonomi besar.

Ketimpangan pengangguran juga terlihat secara spasial antarwilayah. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Papua secara konsisten mencatatkan angka TPT yang tinggi, mengindikasikan tekanan struktural dan urbanisasi yang tidak diiringi kapasitas penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, daerah seperti Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara menunjukkan TPT lebih rendah, karena dominasi sektor pariwisata dan informal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Di Indonesia, implementasi kebijakan fiskal menunjukkan dinamika yang menarik



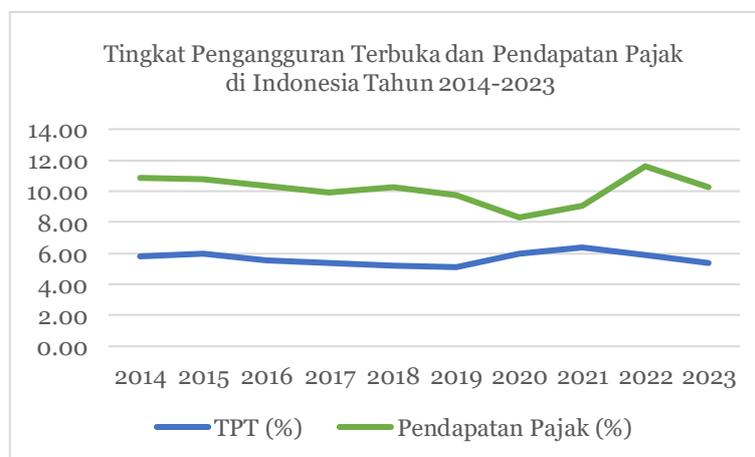
Sumber : World Bank dan BPS (2025)

Gambar 1. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar di atas menunjukkan selama 2014 hingga 2023, pengeluaran pemerintah juga mengalami perubahan. Puncaknya terjadi di tahun 2020, saat pandemi, di mana belanja negara naik tajam hingga hampir 10% dari total ekonomi. Tapi anehnya, pengangguran malah meningkat jadi 7%. Artinya, stimulus pemerintah belum langsung efektif, dan kemungkinan besar butuh waktu untuk memberi dampak nyata ke tenaga kerja.

Temuan ini mengindikasikan bahwa efek pengeluaran pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja tidak bersifat instan, melainkan membutuhkan waktu untuk berdampak nyata pada pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, efektivitas belanja publik sangat tergantung pada kualitas penyalurannya dan sektor yang menjadi prioritas.

Pendapatan pajak juga menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan pengangguran.



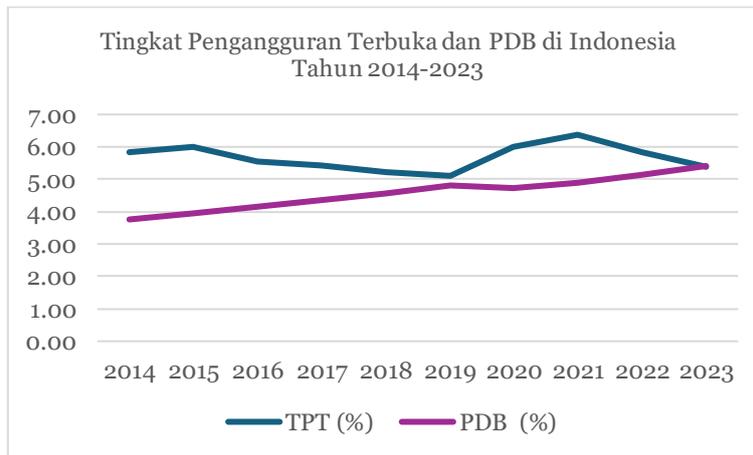
Sumber : World Bank dan BPS (2025)

Gambar 2. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pendapatan Pajak di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar di atas dapat dilihat, dari tahun 2014 ke 2017, ada penurunan yang berbarengan dengan masa pengangguran yang relatif stabil. Lalu di tahun 2020, saat pandemi, pendapatan pajak turun tajam, sementara pengangguran melonjak. Ini menunjukkan adanya hubungan siklus antara lemahnya ekonomi, menurunnya pajak, dan meningkatnya pengangguran.

Kondisi ini mengindikasikan adanya hubungan siklis antara pendapatan negara dan kondisi ketenagakerjaan. Ketika penerimaan pajak melemah, ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi juga menyempit, sehingga risiko kenaikan pengangguran menjadi lebih besar.

Dari perspektif pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan tren peningkatan hampir setiap tahun, kecuali pada periode pandemi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak selalu disertai dengan peningkatan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja.



Sumber : World Bank dan BPS (2025)

Gambar 3. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan PDB di Indonesia Tahun 2014-2023

Gambar terlihat bahwa pada periode 2017–2019, PDB terus tumbuh stabil, namun tingkat pengangguran tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Fenomena ini dikenal sebagai *jobless growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak menghasilkan penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar.

Hal ini menunjukkan bahwa arah dan struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum cukup inklusif dan belum menyentuh sektor-sektor padat karya secara optimal.

Salah satu pendekatan utama untuk mengendalikan pengangguran adalah melalui kebijakan fiskal. Dalam kerangka Keynesian, kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak menjadi alat penting untuk menstimulasi permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDB seharusnya berkorelasi negatif terhadap pengangguran, sebagaimana dijelaskan oleh Hukum Okun (Okun, 1962). Namun, Indonesia menghadapi fenomena *jobless growth*, yakni pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai penciptaan lapangan kerja secara signifikan.

Sejumlah penelitian empiris mendukung temuan tersebut. Sari et al. (2024) membuktikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah secara signifikan menurunkan TPT di Indonesia, khususnya ketika difokuskan pada sektor padat karya. Hasil serupa ditunjukkan oleh Rahmawati & Wahyudi (2019), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja negara berpengaruh negatif terhadap pengangguran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, Irge (2024) juga menegaskan bahwa desain sistem perpajakan yang efisien sangat penting agar kebijakan fiskal mampu memberikan dampak nyata terhadap pasar tenaga kerja.

Penelitian ini perlu dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan Produk Domestik Bruto terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur ekonomi makro mengenai efektivitas kebijakan fiskal di negara berkembang, kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan fiskal yang lebih efektif dalam menanggulangi pengangguran, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi pengangguran

secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dinamika jangka pendek dan penyesuaian jangka panjang yang terobservasi dalam data empiris Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan World Bank (Bank Dunia). Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model ECM (Error Correction Model). Model ini menggunakan variable independent terhadap variabel dependen dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Studi ini dilakukan di Indonesia dengan menggunakan data time series dari tahun 1988-2023. Variabel dependen yang diteliti adalah pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan produk domestik bruto sementara variable independent adalah tingkat pengangguran terbuka. Pengolahan analisis data pada penelitian ini menggunakan software Eviews versi 13. Berikut persamaan regresi:

$$D(TPT_t) = \beta_0 + \beta_1 D(PPM_t) + \beta_2 D(PPJ_t) + \beta_3 D(PDB_t) + \beta_4 ECT(-1) + U_t$$

Dimana :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

β_0 = Konstanta

PPM = Pengeluaran Pemerintah

PPJ = Pendapatan Pajak

PDB = Produk Domestik Bruto

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

U_t = Disturbance term (Kesalahan penganggu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, model ECM digunakan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Variabel independen meliputi pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak dan produk domestik bruto, sementara variabel dependen yang diteliti adalah tingkat pengangguran terbuka.

Uji Stasioner

Tabel 1. Hasil Uji Stasioner

Variabel	Uji akar Unit	Prob	Stasioner
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Level	0.3099	Tidak
	1st difference	0.0373	Ya
Pengeluaran Pemerintah (PPM)	Level	0.5573	Tidak
	1st difference	0.0012	Ya
Pendapatan Pajak (PPJ)	Level	0.4858	Tidak
	1st difference	0.0000	Ya
Produk Domestik Bruto (PDB)	Level	0.9989	Tidak
	1st difference	0.0014	Ya

Sumber : Hasil olahan data dengan E-views 13 (2025)

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan produk domestik bruto telah stasioner pada tingkat *first different*. Variabel yang tidak stasioner di level menjadi stasioner di 1st difference. Hal ini dikarenakan nilai t-statistik ADF lebih kecil dibandingkan nilai kritis pada tingkat 0,05.

Uji Kointegrasi

Tabel 2. Hasil Uji Kointegrasi

Null Hypothesis: ECT has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=7)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.610366	0.0116
Test critical values: 1% level	-3.670170	
5% level	-2.963972	
10% level	-2.621007	

Sumber : Hasil olahan data dengan E-views 13 (2025)

Uji kointegrasi melalui uji ADF ada residual menghasilkan nilai t-statistik -3.610366 (p-value=0.0116), mengindikasikan residual stasioner pada level. Hal ini menunjukkan variabel-variabel tersebut tidak stasioner di level tapi terkointegrasi. Hal ini membuktikan adanya hubungan kointegrasi antar variabel, memenuhi syarat utama untuk pembentukan model ECM. Dalam model ECM nantinya, ECT diharapkan memiliki koefisien negatif signifikan yang menunjukkan kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Hasil Estimasi ECM

Tabel 3. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PPM)	0.107678	0.157947	0.681732	0.5017
D(PPJ)	-0.187778	0.070192	-2.675218	0.0130
D(PDB)	-1.713270	0.826977	-2.071727	0.0488
ECT(-1)	-0.261914	0.089537	-2.925190	0.0072
C	0.314075	0.153601	2.044742	0.0515

Sumber : Hasil olahan data dengan E-views 13 (2025)

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PPM	-0.686834	0.247916	-2.770431	0.0100
PPJ	-0.882497	0.169967	-5.192181	0.0000
PDB	-1.023541	0.344925	-2.967435	0.0062
C	25.81927	3.739722	6.904062	0.0000

Sumber : Hasil olahan data dengan E-views 13 (2025)

Hasil estimasi persamaan jangka Panjang yang terbentuk dari model tersebut yaitu:

$$TPT = 25.81927 - 0.686834(PPM) - 0.882497(PPJ) - 1.023541(PDB)$$

dan persamaan jangka pendek yang terbentuk yaitu:

$$D(TPT) = 0.314075 + 0.107678 D(PPM) - 0.187778 D(PPJ) - 1.713270 D(PDB) - 0.261914 ECT(-1).$$

Dapat dilihat dalam tabel di atas, koefisien ECT bernilai negatif dan signifikan yang dimana probabilitas ECT kecil dari pada 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model ECM valid untuk digunakan karena model memiliki mekanisme penyesuaian dalam jangka panjang. Dengan nilai koefisien ECT sebesar -0.261914, yang artinya jika variabel-variabel dalam model mengalami gangguan atau shock dalam jangka pendek, maka efek kesalahan yang akan dikoreksi sebesar 26% dalam satu periode.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan analisis statistik, ditemukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah (PPM) dalam jangka pendek, berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.17678 dan probabilitas 0.5017 > 0.05. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya efek tunda (time lag) dalam penyaluran dan realisasi anggaran terhadap penciptaan kerja. Misalnya, pada tahun 2020, pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal besar untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19, namun TPT justru meningkat karena penyerapan anggaran dan pelaksanaan proyek belum optimal. Dengan demikian, dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah belum memberikan efek langsung terhadap pengurangan pengangguran. Temuan ini sejalan dengan hasil studi Rahmawati & Wahyudi (2019) yang menekankan bahwa efektivitas belanja pemerintah dalam menurunkan pengangguran sangat tergantung pada kualitas perencanaan, efisiensi pelaksanaan, serta sektor tujuan dari belanja tersebut. Sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti pertanian, industri rumah tangga, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dinilai lebih cepat menciptakan lapangan kerja dibanding sektor-sektor yang padat modal.

Dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah (PPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT), dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.686834 dan probabilitas 0.0100 < 0.05. Artinya, setiap peningkatan 1 persen dalam pengeluaran pemerintah berpotensi menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,68%, dengan asumsi ceteris paribus dan begitupula sebaliknya. Hasil ini konsisten dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong produksi, dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006). Secara kontekstual, dalam kerangka ekonomi Indonesia, belanja negara yang dialokasikan untuk sektor-sektor padat karya seperti infrastruktur,

pendidikan, dan kesehatan terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Studi oleh Afryani et al., (2023) memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran apabila difokuskan pada sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan penciptaan kerja. Selain itu, Zulaikah (2024) dalam studinya juga menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pengeluaran pemerintah dan TPT di Indonesia, yang menegaskan pentingnya efisiensi dan ketepatan arah kebijakan fiskal. Hal serupa juga diungkapkan oleh Omran & Bilan (2020) dalam konteks Mesir, di mana ekspansi fiskal mampu menurunkan tingkat pengangguran jika dibarengi dengan alokasi anggaran yang efektif dan terukur.

Pengaruh Pendapatan Pajak Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Pendapatan pajak (PPJ) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, pendapatan pajak (PPJ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.187778 dan probabilitas $0.0130 < 0.05$, artinya jika peningkatan pendapatan pajak sebesar 1 persen akan menurunkan perubahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.18% dengan asumsi ceteris paribus dan begitupula sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak yang baik dapat segera dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung pada penciptaan kerja. Efek ini menunjukkan pentingnya sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan berbasis digital dalam meningkatkan efektivitas fiskal sebagai instrumen penurunan pengangguran dalam waktu singkat.

Pada estimasi jangka panjang dapat dilihat bahwa pendapatan pajak (PPJ) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dengan koefisien regresi -0.882497 dan probabilitas $0.0000 < 0.05$. Artinya jika setiap kenaikan pendapatan pajak sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.88%, dengan asumsi ceteris paribus dan begitupula sebaliknya. Hal ini mendukung pandangan bahwa penerimaan pajak yang optimal memperkuat kapasitas fiskal negara untuk membiayai program-program strategis, seperti pelatihan kerja, subsidi UMKM, dan infrastruktur ekonomi (Pressman, 2006). Secara praktis, hasil ini sejalan dengan temuan Sari & Prasetyo (2021) yang menegaskan bahwa perluasan basis pajak dan efisiensi sistem perpajakan berdampak positif terhadap ketenagakerjaan melalui pembiayaan program-program strategis. Studi Alhaj Yousef (2023) di Yordania juga menunjukkan bahwa efektivitas pajak terhadap pengangguran sangat bergantung pada penggunaannya dalam belanja produktif. Di Indonesia, meskipun rasio pajak terhadap PDB masih tergolong rendah (sekitar 10%), reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak pada 2022 mendorong peningkatan pendapatan negara yang secara tidak langsung berdampak pada penurunan TPT (Indrawati et al., 2024).

Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam jangka pendek, Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia dengan nilai koefisien regresi sebesar -1.713270 dan probabilitas $0.0488 < 0.05$, artinya jika peningkatan pendapatan pajak sebesar 1 persen akan menurunkan perubahan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.71% dengan asumsi ceteris paribus dan begitupula sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Utari & Kurniati (2012) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan fiskal jangka pendek sangat dipengaruhi oleh kecepatan realisasi anggaran dan sasaran penggunaannya.

Dalam jangka panjang Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) dengan nilai koefisien regresi -1.023542 dan probabilitas $0.0062 < 0.05$. Ini menunjukkan bahwa setiap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.02%, dengan

asumsi *ceteris paribus* dan begitupula sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan Hukum Okun yang menyatakan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan output dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi tumbuh, maka permintaan terhadap barang dan jasa meningkat, sehingga menciptakan permintaan terhadap tenaga kerja (Sari et al., 2024).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi dan pembahasan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Secara jangka panjang, peningkatan pengeluaran pemerintah (PPM), pendapatan pajak (PPJ), dan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aktivitas fiskal yang efektif dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan. Sebaliknya, dalam jangka pendek, hanya pendapatan pajak (PPJ) dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia, sedangkan pengeluaran pemerintah (PPM) tidak signifikan. Kondisi ini mengindikasikan peran penting penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi dalam memberikan stimulus ekonomi langsung terhadap pasar kerja, sementara belanja pemerintah cenderung memiliki efek tertunda (*time lag*).

Hasil ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan fiskal yang lebih produktif dan berpihak pada sektor-sektor padat karya serta pembangunan infrastruktur yang bersifat inklusif. Pemerintah perlu meningkatkan efektivitas belanja negara, khususnya yang diarahkan pada pendidikan, pelatihan kerja, serta dukungan terhadap UMKM dan industri lokal yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Upaya seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan berbagai insentif fiskal harus terus dievaluasi dan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Di sisi lain, kualitas pertumbuhan ekonomi juga harus menjadi perhatian utama. Peningkatan PDB tidak cukup jika tidak disertai dengan distribusi yang merata dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal, kebijakan ketenagakerjaan, dan strategi pembangunan jangka panjang untuk menurunkan pengangguran secara struktural.

Temuan ini juga menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan makroekonomi yang adaptif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan global seperti krisis kesehatan atau ekonomi. Salah satu arah kebijakan yang dapat ditempuh adalah melalui penguatan instrumen automatic stabilizer dan reformasi perpajakan progresif, guna menciptakan ruang fiskal yang lebih luas dan berkeadilan. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga memperkuat daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan jangka pendek dan jangka panjang.

DAFTAR RUJUKAN

- Afryani, V., Ridwan, E., & Kamarni, N. (2023). Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 5(3), 548. <https://doi.org/10.32493/jee.v5i3.28957>
- Alhaj Yousef, E. M. (2023). The Impact of Fiscal Policy Tools on Unemployment Rates in Jordan: Autoregressive Distributed Lag Approach. *Jordan Journal of Economic Sciences*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.35516/jjes.v10i1.843>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>

- Irge, T. W. (2024). *Fiscal Policy and Unemployment in Ethiopia : Evidence from ARDL Model*. 5(4).
- Mankiw. (2006). Pengantar Teori Ekonomi Makro, Edisi Ketiga. In *Erlangga, Jakarta*.
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. *American Statistical Association Proceedings*.
- Omran, E. A. M., & Bilan, Y. (2020). The impact of fiscal policy on the unemployment rate in Egypt. *Montenegrin Journal of Economics*, 16(4), 199–209.
<https://doi.org/10.14254/1800-5845/2020.16-4.16>
- Pressman, S. (2006). *A Post Keynesian Theory of the State*.
- Rahmawati, D., & Wahyudi, A. (2019). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia: Analisis Okun Law. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(2), 101–112.
- Sari, F. M., Astuti, A., Zamanda, D., Restu, F. P., & Fadilla, A. (2024). Kebijakan Fiskal dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jea.v1i4.231>
- Sari, & Prasetyo. (2021). Dampak Pajak Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 10(1), 45–59.
- Utari, G. A. D., & Kurniati, I. N. (2012). *Bulletin of Monetary Economics and Banking Pertumbuhan Kredit Optimal*. 15(2), 2–36.
- Zulaikah. (2024). *Peran Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro*. 6(1), 95–108.